

Sampai dengan tanggal 7 September 2021, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 4.140.634 kasus COVID-19 di seluruh 34 Provinsi di Indonesia, dengan 138.630 kasus aktif, 137.156 kematian, dan 3.864.848 orang telah dinyatakan pulih dari penyakit. Pemerintah juga mencatat kasus terduga sebanyak 127.465 orang.

Hingga 4 September 2021, Indonesia telah menerima sekitar 220,4 juta vaksin dalam bentuk bahan baku dan vaksin jadi. Selama bulan Agustus jumlah vaksin yang diterima mencapai 43 juta dosis, dan pada bulan September diperkirakan jumlah vaksin yang akan diterima mencapai 60 juta dosis. Rincian kedatangan vaksin dapat dilihat sebagai berikut:

Vaksin	Total vaksin diterima	Keterangan
Sinovac Biotech	179,3	Sebagian datang dalam bentuk bahan baku, dan diolah oleh Bio Farma menjadi vaksin siap pakai.
AstraZeneca	22,6	Melalui Fasilitas COVAX, dukungan kerjasama Pemerintah Australia (melalui UNICEF), Belanda, Jepang dan Inggris serta pembelian bilateral
Moderna	8,1	dukungan Pemerintah AS melalui COVAX Facility
Sinopharm	7,6	Skema Gotong Royong pihak swasta dan dukungan Uni Emirat Arab
Pfizer	2,8	Dari Pemerintah Amerika Serikat

Indonesia menargetkan vaksinasi COVID-19 bagi 208,3 juta penduduk dan telah memberikan vaksin dosis pertama sebanyak 32 per 100 penduduk sasaran sampai dengan 5 September 2021. Sementara capaian vaksinasi per kelompok prioritas adalah sebagai berikut:

Kelompok prioritas	Sasaran	Capaian – dosis I	Capaian – dosis II
Lansia	21,5 juta	5,39 juta (25%)	3,84 juta (18%)
Petugas publik,	17,3 juta	36,4 juta (209%)	20,17 juta (116%)
Masyarakat rentan dan umum	141,2 juta	19,75 juta (14%)	10, 2 juta (7%)
Anak 12-17 tahun	26,7 juta	2,77 juta (10%)	1,9 juta (7%)
Petugas medis	1,4 juta	Dosis I dan II telah mencapai >100%, dosis III / booster: 713 ribu (48,5%)	

Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan lembaga non-pemerintah melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi warga penyandang disabilitas di enam provinsi: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali. Vaksinasi diberikan melalui fasilitas pelayanan kesehatan dan sentra vaksinasi COVID-19 dan menargetkan sebanyak 225.000 orang dari total 562.242 penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.

Pemerintah terus memperluas penggunaan platform PeduliLindungi, yang telah digunakan di sektor transportasi, pusat perbelanjaan, fasilitas olah raga, pariwisata, dan menyusul di lingkungan perusahaan industri dan kawasan industri. Hingga 29 Agustus, Kementerian Koordinasi bidang Maritim dan Investasi mencatat 13,6 juta anggota masyarakat yang melakukan skrining melalui aplikasi PeduliLindungi.

Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terus diterapkan sampai 13 September 2021 di wilayah Jawa dan Bali, dan sampai 20 September 2021 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,

dan Papua. Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 39 dan 40 Tahun 2021, sebanyak 34 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 4, 311 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 3, dan 160 lainnya menerapkan PPKM level 2.

Pelaksanaan PPKM dioptimalkan dengan berfungsinya Pos Komando di tingkat desa. Per 3 September 2021, sebanyak 51.498 Pos Komando telah dibentuk, atau 69% dari total 74.961 desa, seperti dilaporkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Terdapat 13 provinsi yang sudah melaporkan pembentukan Pos Komando tingkat desa hingga 100 persen, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur dan Gorontalo.

Jakarta memulai pembelajaran tatap muka pada 30 Agustus, yang diikuti oleh 610 sekolah. Pilihan pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan kapasitas maksimal 50 persen bagi daerah yang masuk dalam penanganan PPKM level 3, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Sementara itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melanjutkan bantuan Kuota Data Internet untuk bulan September-November 2021 kepada siswa Pendidikan Anak Usia Dini (sebesar 7 GB), siswa, pendidikan dasar dan menengah (10 GB), guru (12 GB), serta mahasiswa dan dosen (15 GB).

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah memulai penancangan Gerakan Solidaritas dan Kedermawanan Penanganan Covid-19, yang menjadi arahan Presiden pada awal Agustus 2021. Serangkaian rapat persiapan Gerakan ini telah dilakukan bersama Kementerian/Lembaga, lembaga filantropi serta lembaga non-pemerintah lainnya di bulan Agustus, untuk membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, yang terdiri dari sekretariat dan tujuh kelompok kerja.

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 20 Agustus 2021, yang mencapai Rp 326,16 triliun atau 43.8% dari total pagu anggaran Rp 744,75 triliun, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021. Alokasi dan realisasi tersebut mencakup program utama sebagai berikut:

- Kesehatan, yang mencakup pengelolaan Rumah Sakit Darurat Asrama Haji Pondok Gede, pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan untuk 426.940 pasien, pemberian insentif untuk 861.900 tenaga kesehatan, santunan kematian untuk 278 tenaga kesehatan, pengadaan 81,42 juta dosis vaksin, serta bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk 19,15 juta orang, dengan realisasi mencapai Rp 77,18 triliun atau 35,9% dari pagu anggaran Rp 214,95 triliun
- Perlindungan sosial, yang meliputi program bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan, kartu sembako, bantuan beras, bantuan kuota internet, bantuan subsidi upah, subsidi listrik dan Kartu Pra Kerja, dengan realisasi sebesar Rp 99,33 triliun atau 52,9% dari pagu anggaran Rp 187,84 triliun.
- Dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, terutama untuk pemberian bantuan pelaku usaha mikro (BPUM), penempatan dana pada bank, serta subsidi bunga KUR dan non-KUR, yang terealisasi sebesar Rp 48,02 triliun atau 29.8% dari pagu anggaran Rp 161,20 triliun.
- Insentif Usaha dan Pajak, antara lain dalam bentuk insentif/pembebasan/pengurangan/penurunan tarif pajak penghasilan tertentu, dan pajak penjualan property dan mobil, terealisasi sebesar Rp 51,97 triliun atau 82,7% dari pagu anggaran Rp 62,83 triliun..
- Program Prioritas, yang digunakan untuk Program Padat Karya Kementerian/Lembaga, pariwisata, ketahanan pangan dan fasilitas pinjaman daerah, dengan realisasi sebesar Rp 50,25 triliun atau 42,6% dari pagu anggaran Rp 117,94 triliun.